

BAB II

PEMERATAAN PENDIDIKAN

2.1 Pendidikan Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia dengan populasi 270 juta jiwa dan memiliki pulau sebanyak 17.000 Pulau. Indonesia memiliki pulau utama yang menjadi tempat hidup dan berkembang yang diantara salah satunya adalah Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatra, dan Papua ditambah dengan adanya pulau pulau kecil dengan memiliki peranan penting salah satunya adalah Bali, Karimunjawa, Gili, dan Lombok yang juga menjadi tujuan wisata lokal dan internasional. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai populasi terbanyak di dunia yang mencapai 250 juta jiwa di tahun 2016 yang juga terdiri dari 300 suku dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam³¹.

Pendidikan Nasional Indonesia adalah Pendidikan yang berdasar kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengakar pada nilai agama, dan kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap atas tuntutan perubahan zaman. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan berbagai usaha dan perjuangan dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan yang paling utama adalah pelaksana pendidikan yaitu tenaga pengajar seperti guru. Hal ini sejalan dengan adanya amandemen Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki tujuan mengembangkan peserta didik yang menjadi

³¹ Republik Federal Jerman Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, "Sekilas Tentang Indonesia," Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Republik Federal Jerman, 2018, https://www.kemlu.go.id/frankfurt/id/pages/sekilas_tentang_indonesia/4695/etc-menu.

manusia beriman, bertawakal kepada tuhan yang maha esa, berahlak mulia, berilmu, cakap, sehat, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab³².

Pendidikan Indonesia sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 memiliki tujuan yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya (aktualisasi) dengan pertimbangan berbagai kemungkinan yang ada (potensialitas), dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang apa seharusnya atau menjadi manusia yang dicita citakan (idealitas). Tujuan pendidikan di Indonesia tiada lain adalah menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berahlakmulia, cerdas, sehat, berperasaan, memiliki kemauan, berkarya, memenuhi kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan nafsum berkepribadian, berbudaya, dan bermasyarakat. Adanya hal tersebut berimplikasi pada usaha untuk mewujudkan potensi potensi yang ada di manusia dalam dimensi moralitas, keragaman, personalitas, sosialitas, dan kebudayaan secara menyeluruh yang dalam kata lain memanusiaikan manusia.

Tujuan pendidikan menurut A. Tresna Sastrawijaya berpendapat bahwa pendidikan memiliki tujuan untuk kesiapan jabatan, keterampilan memecahkan masalah, efektifitas waktu, dan sebagainya sesuai harapan dan tujuan masing masing siswa. Menurut S Nasution berpendapat bahwa setiapsekolah mendidik anak supaya mampu dan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pendidikan juga diharapkan menjadi pemupuk iman yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, meningkatkan pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sesuai

³² Wahid Khoirul Ikhwan, "IMPLEMENTASI STANDAR ISI, STANDAR PROSES, DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SEBAGAI STANDAR MUTU PENDIDIKAN MTs NEGERI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG," *Journal Pedagogia* 4, no. 1 (2015), <https://pedagogia.umsida.ac.id/index.php/pedagogia/article/view/1339>.

dengan Undang-Undang No20 tahun 2003 Pasal 4 mengatur tentang pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang menyebutkan:

1. Pendidikan di selenggarakan dengan cara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia beserta nilai keagamaan, Kultur dan Kemajemukan Bangsa.
2. Pendidikan di selenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem yang terbuka dan multi makna
3. Pendidikan juga harus diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan juga pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan di terselenggara dengan memberikan teladan, dan membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan juga diselenggarakan dengan mengembangkan literasi, kepenulisan, dan bergitung
6. Pendidikan juga diselenggarakan dengan memperdayakan komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pada hal ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi institusi terkait atau institusi pendidik, namun terlebih daripada itu masyarakat, dan pemerintah juga memiliki peran untuk andil dalam mensukseskan pendidikan nasional Indonesia. Adanya hal tersebut memiliki arti bahwa pendidikan di Indonesia memiliki hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara³³.

³³ I Wayan Cong Sujana, "FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN INDONESIA," *Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2019).

Pendidikan adalah usaha yang paling dasar dan terencana dalam Upaya mewujudkan proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik dengan efektif dalam pengembangan potensi dirinya yang juga memiliki kekuatan kecerdasan, spiritual, pengendalian diri, kepribadian, dan ahlak. Pendidikan tidak sebatas sebagai usaha dalam pemberian informasi dan membentuk suatu keterampilan, tapi hal ini bisa lebih luas hingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan, kemampuan individu sehingga bisa tercapainya kehidupan pribadi dan sosial yang memuaskan. H. Horne berpendapat bahwa Pendidikan adalah proses yang dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang memiliki perkembangan baik secara fisik dan mental yang bebas dan sadar hasil anugerah dari Tuhan, dan hal ini termanifestasi dalam bentuk intelektual, kemanusiaan, dan emosional manusia³⁴.

Pendidikan adalah proses penting dalam peningkatan kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian dan semangat kebersamaan membangun bangsa. Pendidikan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam setiap individu. Pendidikan juga tidak bisa dilepas dari aktivitas yang dilakukan manusia. Pendidikan juga menjadi tolak ukur dalam penilaian kemajuan suatu bangsa. Kualitas Pendidikan memiliki peranan fundamental dalam membawa negara atau bangsa untuk berkembang atau tidak. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization yang biasa dikenal dengan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa berpendapat bahwa Pendidikan memiliki fungsi sebagai kunci membuka jalan dalam membangun dan memperbaiki negara. Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar berpendapat bahwa kualitas dari suatu Pendidikan merupakan kemampuan suatu Lembaga Pendidikan untuk

³⁴ Abd Rahman BP et al., "PENGERTIAN PENDIDIKAN, ILMU PENDIDIKAN DAN UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN," *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>.

memanfaat sumber Pendidikan secara optimal dalam rangka meningkatkan kemampuan belajar³⁵.

2.1.1 Index Pembangunan Manusia (IPM)

Indonesia sebagai negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat, Indonesia mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk pendidikan. Meski terdapat perbedaan antar provinsi, namun upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan telah menunjukkan hasil positif dan membawa Indonesia menjadi lebih baik di tingkat global. Namun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama di daerah dengan akses terbatas dan masalah pendidikan yang beragam. Dengan terus fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan, Indonesia diharapkan dapat mencapai tingkat IPM yang lebih tinggi, yang mencerminkan kondisi pendidikan yang lebih adil dan berkualitas tinggi di seluruh negeri.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran dalam pencapaian rata-rata dalam aspek-aspek utama pembangunan manusia. Faktor faktor penilaian tersebut adalah jiwa berumur panjang, hidup sehat, seimbang, dan mempunyai taraf hidup layak. IPM adalah rata-rata geometrik dari indeks yang dinormalisasi dari masing-masing tiga dimensi. Dimensi kesehatan dinilai dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir, dan dimensi pendidikan dinilai dengan rata-rata lama

³⁵ Hengki Nurhuda, "MASALAH-MASALAH PENDIDIKAN NASIONAL; FAKTORFAKTOR DAN SOLUSI YANG DITAWARKAN NATIONAL EDUCATION PROBLEMS; FACTORS AND SOLUTIONS OFFERED," *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar* 5, no. 2 (2022), <https://stai-binamadani.e-journal.id/jurdir/article/view/406>.

bersekolah orang dewasa berusia 25 tahun ke atas dan perkiraan lama bersekolah anak usia sekolah.

Standar hidup diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita. IPM menggunakan logaritma pendapatan untuk mencerminkan semakin pentingnya pendapatan seiring dengan meningkatnya pendapatan nasional bruto. Nilai indeks IPM tiga dimensi tersebut kemudian digabungkan menjadi indeks komposit menggunakan mean geometrik.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk mempertanyakan keputusan kebijakan nasional dengan menanyakan bagaimana dua negara dengan pendapatan bruto per kapita yang sama dapat mencapai hasil pembangunan manusia yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan perdebatan mengenai prioritas kebijakan pemerintah. IPM menyederhanakan dan hanya mencakup sebagian pengertian pembangunan manusia. IPM tidak mencerminkan kesenjangan, kemiskinan, keamanan manusia atau penentuan nasib sendiri³⁶.

³⁶ UNDP, "Human Development Index," UNDP, n.d., <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>.

Tabel peringkat *Human Development Index 2023-204*

<i>HDI Rank</i>	<i>Country</i>	<i>Human Development Index (HDI)</i>	<i>Life expectancy at birth</i>	<i>Expected years of schooling</i>	<i>Mean years of schooling</i>	<i>Gross national income (GNI) per capita</i>
107	Vietnam	0.726	74.6	13.1 t	8.5 c	10,814
108	Saint Lucia	0.725	71.3	12.7	8.6 c	14,778
109	Lebanon	0.723	74.4	12.1 u	8.6 k	12,313 v
110	South Africa	0.717	61.5	14.3	11.6	13,186
111	Palestine	0.716	73.4	13.2	9.9	6,936
112	Indonesia	0.713	68.3	14.0 c	8.6	12,046
113	Philippines	0.710	72.2	12.8	9.0 c	9,059
114	Botswana	0.708	65.9	11.4	10.4	14,842
115	Jamaica	0.706	70.6	12.5 c	9.2 c	9,695
116	Samoa	0.702	72.6	12.4	11.4 c	4,970
117	Kyrgyzstan	0.701	70.5	13.0	12.0 c	4,782

Tabel 1. Data Ranking Negara dalam *Human Development Index*

Sumber: United Nations Development Program

Indonesia menempati peringkat 112 dalam Human Development Index (HDI) dengan nilai 0,713. Meskipun hal ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan manusia, masih ada ruang untuk perbaikan. Rata-rata angka harapan hidup

di Indonesia adalah 68,3 tahun, rata-rata harapan lama bersekolah adalah 14 tahun, dan rata-rata waktu menyelesaikan pendidikan adalah 8,6 tahun. Meskipun pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Indonesia adalah US\$12.046, yang mencerminkan situasi ekonomi yang berkembang, negara ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai pemerataan dan inklusivitas dalam pembangunan.

Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia 2023-24, Indonesia berada di peringkat tengah dalam skala Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan peningkatan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Meskipun upaya signifikan telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup, tantangan masih tetap ada, terutama karena distribusi layanan dasar yang tidak merata di seluruh wilayah. Ketimpangan ini mencerminkan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang lebih adil.

Laporan ini juga menyoroti perlunya meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil dan pedesaan. Perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar wilayah menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Dengan berfokus pada kebijakan yang mendukung pembangunan manusia secara keseluruhan, Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan yang ada. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan investasi berkelanjutan di bidang pendidikan dan kesehatan serta penguatan kebijakan yang mendorong inklusi sosial dan ekonomi. Dengan mengatasi kesenjangan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang luas, Indonesia dapat semakin meningkatkan

posisinya dalam Indeks Pembangunan Manusia dan mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif³⁷.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tetap berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Inisiatif tersebut salah satunya melalui Asesmen Nasional (AN). Merupakan program evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menjangkau masukan, proses, dan keluaran pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Berbagai Inovasi Indonesia untuk Anak Sekolah (INOVASI) patut terus dikawal. Sebab, mewujudkan kualitas pembelajaran masa depan memerlukan perhatian seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia masih relatif rendah dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Berdasarkan data yang dipublikasikan worldtop20.org, Indonesia akan menduduki peringkat ke-67 dari 209 negara di dunia pada pemeringkatan pendidikan tahun 2023. Dalam pemeringkatan Indonesia, Albania berada di peringkat 66 dan Serbia di peringkat 68. Pemeringkatan ini dibuat berdasarkan lima tingkatan: angka partisipasi prasekolah di Indonesia sebesar 68%, angka kelulusan sekolah dasar sebesar 100%, dan angka kelulusan. Tingkat kelulusan SMP sebesar 91,19%, tingkat kelulusan SMA sebesar 78%. Tingkat penyelesaian PT atau Perguruan Tinggi adalah 19%.

Peringkat pendidikan Indonesia tahun lalu, 2022, juga berada di peringkat 67. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih belum membaik. Faktanya, bonus demografi sudah dekat. Tentunya di era transformasi digital, guru berperan penting dalam membentuk siswa menjadi pribadi dan berkepribadian baik. Berdasarkan hasil tersebut, Indonesia masih perlu melakukan perbaikan di beberapa bidang.

³⁷ Human Development Report Office (HDRO), "Human Development Report 2023-2024" (New York, 2024), <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf>.

Anggaran pendidikan Indonesia saat ini masih rendah, sehingga salah satu faktor yang menarik perhatian adalah peningkatan pendanaan pendidikan. Menurut data BPS tahun 2022, PDB Indonesia sebesar Rp 19,588 triliun. Sedangkan anggaran pendidikan yang akan direalisasikan pada tahun 2022 mencapai Rp 472,6 triliun. Artinya anggaran pendidikan Indonesia masih hanya 2,4% PDB. Di sisi lain, total anggaran pendidikan per siswa di Indonesia sebesar US\$1.383, sekitar Rp 21,3 juta (kurs: Rp 15.387,85), relatif rendah dibandingkan negara lain³⁸.

Indeks Pembangunan Manusia (HDI) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pembangunan manusia dalam tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang memadai. Indeks ini menggabungkan indikator-indikator seperti harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita untuk memberikan gambaran tentang kemajuan suatu negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kini menjadi tantangan global yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, melindungi planet ini, dan menjamin kesejahteraan semua orang.

Dalam melaksanakan pembangunan yang sejalan dengan SDGs, tidak hanya aspek ekonomi saja yang diperhatikan, namun juga aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, keterkaitan HDI dan SDGs menjadi sangat hubungan yang tidak bisa dipisahkan dan penting karena HDI menyediakan metrik yang dapat digunakan untuk memantau kemajuan menuju target SDG.

Peningkatan HDI melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs seperti Tujuan 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas). Oleh karena itu, kombinasi pernyataan pembangunan yang selaras dengan HDI dan SDG menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi dan

³⁸ Masyhud, "Tingkatkan Kualitas Pembelajaran Untuk Masa Depan," Universitas Muhammadiyah Malang, 2023, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/bhirawa/tingkatkan-kualitas-pembelajaran-untuk-masa-depan.html#:~:text=Pada tahun 2023%2C berdasarkan data,Serbia di posisi ke-68.>

membentuk kerangka kerja untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan bagian penting dari pembangunan Indonesia dan memiliki fokus khusus pada pendidikan, yang merupakan kunci untuk mencapai tujuan lainnya, yang salah satunya adalah dengan berkomitmen untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, selaras dengan visi Indonesia untuk mengembangkan angkatan kerja kelas dunia. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan regional dan memastikan kesempatan yang sama bagi semua anak, termasuk mereka yang berasal dari daerah terpencil dan kelompok marginal. Penerapan program seperti wajib belajar 12 tahun, peningkatan kapasitas guru dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan merupakan langkah konkrit menuju pencapaian SDGs. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas menjadi landasan kuat bagi pendidikan berkelanjutan.

Sesuai dengan Human Development Index (HDI) ada tiga kategori SDGs yang menjadi faktor atau indikator penilaian HDI. SDGs yang dilihat adalah SDG3 tentang kemungkinan hidup, SDG 4 tentang pendidikan yang berkualitas, SDG 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. SDG 3 (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3) bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Di Indonesia, pencapaian SDG 3 akan melibatkan serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, memerangi penyakit menular, dan juga meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan penting dalam upaya mencapai SDG 3, antara lain:

1. Mengurangi angka kematian ibu

Pada tahun 2030, menurunkan angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup

2. Mengakhiri Semua Kematian yang Dapat Dicegah di Bawah Usia 5 Tahun.

Pada tahun 2030, mmengakhiri adanya kematian bayi baru lahir dan anak kecil yang dapat dicegah. Semua negara berkomitmen untuk menurunkan angka kematian Neonatal minimal 12 kematian per 1.000 KH (kelahiran hidup).

3. Memerangi Penyakit Menular

Penyakit menular Pada tahun 2030, mengakhiri dan memerangi epidemi AIDS, Tuberkolosis (TBC), malaria dan penelantaran anak. Penyakit tropis Hepatitis, penyakit yang ditularkan melalui air dan penyakit menular lainnya

4. Mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular dan meningkatkan kesehatan mental

Pada tahun 2030, mengurangi kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan, pengobatan dan peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan

5. Mencegah dan mengobati penyalahgunaan zat

Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

6. mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kematian

Pada tahun 2030, mengurangi separuh jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas.

7. Akses universal terhadap perawatan seksual dan reproduksi, keluarga berencana dan pendidikan

Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan

seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional

8. Mencapai cakupan kesehatan universal

Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang

9. Mengurangi penyakit dan kematian akibat bahan kimia berbahaya dan polusi

Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya serta polusi dan kontaminasi udara, air dan tanah

10. Melaksanakan konvensi kerangka kerja WHO tentang pengendalian tembakau

Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat

11. Mendukung penelitian, pengembangan, dan akses universal terhadap vaksin dan obat-obatan yang terjangkau

Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular yang terutama menyerang negara-negara berkembang

12. Meningkatkan pembiayaan kesehatan dan dukungan kesehatan bagi pekerja di negara-negara berkembang

Meningkatkan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pelatihan, dan pelatihan tenaga kesehatan di negara-negara berkembang, terutama negara-negara

kurang berkembang dan negara-negara berkembang kepulauan kecil Meningkatkan pelatihan dan retensi secara signifikan.

13. Meningkatkan sistem peringatan dini untuk risiko kesehatan global Meningkatkan kapasitas semua negara, terutama negara berkembang, untuk peringatan dini, mitigasi risiko, dan pengelolaan risiko kesehatan nasional dan global³⁹.

Indikator berikutnya dalam *Human Development Index* berikutnya adalah SDG 4 adalah tentang Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua. Dalam Asesmen Nasional (AN) menilai kompetensi penting yang dibutuhkan seluruh siswa untuk mengembangkan diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Dua keterampilan dasar yang diukur oleh AN adalah keterampilan membaca dan keterampilan matematika (perhitungan). Tujuan utama AN adalah untuk melatih siswa yang bersifat penalaran, dan AN dapat digunakan untuk melatih siswa sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir logis (kemampuan dasar) dalam bidang membaca, menulis, dan berhitung. Variabel SDG4 antara lain:

1. Pendidikan dasar dan menengah gratis

Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mempunyai akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang gratis, adil dan berkualitas yang mengarah pada hasil pembelajaran yang relevan dan efektif

2. Akses yang setara terhadap anak usia dini yang berkualitas pendidikan anak usia dini yang berkualitas

³⁹ Bappenas, "KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA," Bappenas, n.d., <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-3/>.

Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pengembangan, perawatan, dukungan, dan pendidikan pra-sekolah anak usia dini yang berkualitas; Bersiaplah untuk menerima.

3. Akses yang setara terhadap pendidikan teknik, kejuruan, dan pendidikan tinggi

Pada tahun 2030, semua perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap pendidikan teknis, kejuruan, dan pendidikan tinggi, termasuk universitas. Pada poin ini adalah salah satu indikator yang digunakan dalam *Human Development Index, United Nations Development Programme*.

4. Meningkatkan jumlah orang dengan keterampilan yang relevan dengan keberhasilan finansial

Pada tahun 2030, meningkatkan jumlah orang dengan keterampilan yang relevan dengan keberhasilan ekonomi, pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan

5. Menghapuskan segala diskriminasi dalam pendidikan

Pada tahun 2030, menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan memastikan akses yang setara terhadap pendidikan dan pelatihan kejuruan di semua tingkatan bagi komunitas rentan, termasuk penyandang disabilitas, komunitas adat, dan anak-anak rentan

6. Kemahiran melek huruf dan berhitung secara universal

Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua generasi muda, pria dan wanita, serta sebagian kelompok dewasa sudah melek huruf dan berhitung

7. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan kewarganegaraan global

Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan mengenai pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan promosi budaya damai dan non-perdamaian untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui: Kekerasan, kewarganegaraan global, penghormatan terhadap keragaman budaya, dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan

8. Membangun dan meningkatkan sekolah inklusif dan aman Pendidikan ramah anak Membangun dan meningkatkan institusi, disabilitas- dan institusi pendidikan ramah gender Menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif untuk semua + Memperluas beasiswa pendidikan tinggi untuk negara-negara berkembang 2020 Pada tahun 2019, jumlah beasiswa ke negara-negara berkembang di seluruh dunia, terutama negara-negara kurang berkembang akan diperluas secara signifikan. Negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara Afrika dapat mengajukan permohonan untuk masuk ke pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program

teknik, program teknik dan sains di negara maju dan berkembang lainnya.

9. Meningkatkan pasokan guru yang berkualitas di negara-negara berkembang

Pada tahun 2030, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan negara-negara berkembang kepulauan kecil, Meningkatkan pasokan guru yang berkualitas secara signifikan⁴⁰.

Indikator berikutnya dalam *Human Development Index* berikutnya adalah SDG 8 adalah Tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan inklusif serta pekerjaan yang layak untuk semua. Fokus pada sektor yang bernilai tambah tinggi dan padat karya Mencapai produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, perbaikan dan inovasi. Pada tahun 2030, sejalan dengan kerangka program 10 tahun untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan, bertujuan untuk secara progresif meningkatkan efisiensi sumber daya dunia dalam konsumsi dan produksi dan melibatkan negara-negara maju dalam memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan. Variabel dalam SDG 8 antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita yang sepadan dengan kondisi nasional, khususnya minimal 7% dari produk domestik bruto tahunan di negara-negara kurang berkembang.

⁴⁰ Bappenas, "PENDIDIKAN BERKUALITAS," Bappenas, n.d., <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-4/>.

2. Diversifikasi, inovasi dan peningkatan produktivitas ekonomi

Produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi dan inovasi, termasuk fokus pada peningkatan nilai tambah dan pencapaian sektor padat karya.

3. Mendorong kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan usaha

Kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta regularisasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Hal ini juga termasuk melalui akses terhadap layanan keuangan.

4. Meningkatkan efisiensi sumber daya dalam konsumsi dan produksi

Pada tahun 2030, secara bertahap meningkatkan efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, sejalan dengan kerangka sepuluh tahun Program Masyarakat Berkelanjutan, berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari lingkungan hidup degradasi. Konsumsi dan produksi berkelanjutan berpusat pada negara-negara maju.

5. Pekerjaan Penuh dan Pekerjaan Layak dengan Gaya yang Sama

Pada tahun 2030, tercapainya lapangan kerja yang berkelanjutan dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk kaum muda dan penyandang disabilitas, serta upah yang setara untuk pekerjaan yang bernilai sama.

6. Mempromosikan lapangan kerja, pendidikan dan pelatihan bagi kaum muda

Pada tahun 2020, secara signifikan mengurangi proporsi kaum muda yang tidak bekerja atau sedang menjalani pendidikan atau pelatihan.

7. Mengakhiri perbudakan modern.

Perdagangan dan pekerja anak Mengambil tindakan segera untuk menghapuskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan perdagangan manusia, dan memastikan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak.

8. Melindungi hak-hak pekerja dan mendorong kondisi kerja yang aman

Melindungi hak-hak pekerja dan mendorong kondisi kerja yang aman bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan pekerja yang melakukan pekerjaan berbahaya lingkungan bagi karyawan.

9. Mempromosikan pariwisata yang menguntungkan dan berkelanjutan

Pada tahun 2030, mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

10. Akses Universal terhadap Perbankan, Asuransi dan Jasa Keuangan

Memperkuat kapasitas lembaga keuangan dalam negeri untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan untuk semua.

11. Meningkatkan bantuan dukungan perdagangan Meningkatkan bantuan

dukungan perdagangan kepada negara-negara berkembang, terutama negara-negara kurang berkembang, termasuk melalui penguatan kerangka terpadu untuk bantuan teknis terkait perdagangan yang dilakukan kepada negara-negara kurang berkembang.

12. Mengembangkan strategi ketenagakerjaan muda global Pada tahun 2020, mengembangkan dan menerapkan strategi ketenagakerjaan muda global dan melaksanakan Konvensi Ketenagakerjaan Global Organisasi Buruh Internasional⁴¹.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 3, 4, dan 8 sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. SDG 3 menekankan pentingnya kesehatan dan kesejahteraan sebagai landasan pembelajaran siswa yang optimal. Ketika siswa sehat, mereka dapat lebih fokus dan produktif dalam kegiatan belajarnya. SDG 4 bertujuan untuk pendidikan inklusif, adil dan berkualitas. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan, pelatihan guru dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi menekankan perlunya menciptakan peluang kerja yang sepadan dengan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan. Oleh karena itu, mengintegrasikan kesehatan, pendidikan berkualitas, dan pelatihan kejuruan ke dalam sistem pendidikan Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Indonesia memiliki sistem pendidikan dengan tiga jenjang yang kemudian biasa disebut dengan wajib belajar 12 tahun. Didalam sistem tersebut, pendidikan di mulai dengan Tingkat pertama yaitu Sekolah Dasar (SD) pada jenjang tersebut waktu yang ditempuh adalah enam tahun dengan setiap tahunnya terdiri atas kelas satu hingga kelas enam. Ini adalah jenjang pertama untuk seorang siswa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Kedua adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pada jenjang ini menjadi jenjang pasca menyelesaikan pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar. Pada jenjang ini di

⁴¹ Bappenas, "PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI," Bappenas, n.d., <https://sdgs.bappenas.go.id/17-goals/goal-8/>.

tempuh selama tiga tahun dengan dibagi tingkatan di setiap tahunnya. Ketiga adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pada jenjang ini adalah jenjang terakhir yang wajib di tempuh dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jenjang ini di tempuh selama tiga tahun dengan di bagi di tiap kelasnya di setiap tahunnya. Pada Tingkat ini juga memiliki jenjang setara yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mengedepankan minat teknis setiap ketertarikan siswa⁴².

Masalah pendidikan nasional yang terjadi menjadikan suatu tantangan Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Berbagai permasalahan Indonesia dalam lingkup pendidikan salah satunya adalah pendidikan yang kurang merata. Indonesia adalah negara yang berkembang dan masih mengalami banyak masalah dalam pembangunan. Di sektor pendidikan, permasalahan pemerataan dapat terjadi karena adanya kurang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dan kurangnya sumber daya dalam menghasilkan upaya melahirkan lembaga pendidikan yang berkualitas. Adanya hal tersebut melahirkan pendidikan yang tidak terjangkau dari segi fasilitas hingga ekonomi. Maka hal tersebut membuat masyarakat di ekonomi rendah tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak atau bisa tidak mengenyam pendidikan sama sekali⁴³.

Indonesia memiliki letak geografis diantara Benua Asia dan Benua Australia dan diantara dua Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Adanya hal tersebut menjadi posisi strategis bagi geografis Indonesia karena menjadi salah satu tempat perlintasan dunia baik sgi udara, dan laut. Adanya letak geografis tersebut juga menjadi pengaruh kebudayaan dan peradaban dunia. Geografis juga menjadi faktor yang mempengaruhi musim di

⁴² Sekolah Link, "Kenali Sistem Pendidikan Di Indonesia Saat Ini," Sekolah Link, n.d., <https://sekolah.link/informasi-sekolah/sistem-pendidikan-di-indonesia/>.

⁴³ Ibid, Hal131

Indonesia yang menyebabkan menjadi salah satu negara agraris di dunia. Hal tersebut menjadikan Indonesia memiliki sektor pertanian yang menghasilkan⁴⁴.

Letak geografis Indonesia yang luas juga menjadi salah satu tantangan dalam masalah pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia. Banyak terjadi ketimpangan pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Hal ini biasa ditemui adanya fasilitas pendidikan yang sederhana bahkan tidak sesuai dengan standar yang ada. Masalah utamanya adalah terjadi ketimpangan pendidikan atau bisa disebut tidak meratanya pendidikan adalah akses pendidikan yang sulit, minimnya jumlah gur, tidak layaknya fasilitas yang ada, perekonomian yang rendah, dan juga pola pikir yang terbangun di dalam masyarakat setempat⁴⁵.

Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan bisa menyediakan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga pendidikan bisa menjadi fasilitas untuk pembangunan sumber daya manusia dalam mendukung masyarakat dalam hal pembangunan⁴⁶.

Pemerataan pendidikan adalah masalah yang masif dan masih bisa dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contoh masalah pemerataan pendidikan yang dalam hal ini adalah Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Monodow Selatan, Sulawesi utara adalah kabupaten yang masih menghadapi masalah pemerataan pendidikan. Banyak anak-anak di usia sekolah tidak bersekolah

⁴⁴ Khazakhstan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana, "Geografi Indonesia," Kedutaan Besar Republik Indonesia di Astana, Khazakhstan, n.d., <https://www.kemlu.go.id/nur-sultan/id/pages/geografi/41/etc-menu>.

⁴⁵ Baitul Maaf Hidayatullah, "Ketimpangan Pendidikan Di Pelosok Indonesia, Apa Peran Kita?," Baitul Maaf Hidayatullah, n.d., <https://bmh.or.id/pendidikan-di-pelosok-indonesia/>.

⁴⁶ Afando, "Pemerataan Permasalahan Pokok Pendidikan Di Indonesia" (Padang, n.d.), <https://osf.io/4d6bn/download/?format=pdf>.

dikarenakan banyak dari mereka tidak sekolah dikarenakan faktor ekonomi dan juga faktor lingkungan.

Guru di sekolah daerah tersebut sebagian besar dari daerah sekitarnya seperti Gorontalo atau Kotamobagu. Tidak banyak dari warga setempat yang berhasil menyelesaikan hingga pada jenjang sarjana, kebanyakan dari mereka adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA). Perhatian pemerintah pada daerah terpencil untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan yang khususnya masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah hal penting untuk memberikan bantuan berupa fasilitas, dan juga kesejahteraan para tenaga pengajar. Hal tersebut juga penting untuk ditunjang dukungan masyarakat setempat dalam mendukung Upaya mendidik anak-anak di usia sekolah untuk menggapai pendidikan dan kehidupan yang baik⁴⁷.

Daerah Indonesia lain yang mengalami masalah pemerataan pendidikan adalah Papua. Papua adalah provinsi yang berdiri tahun 1 Mei 1963 yang sebagian besar luasannya adalah hutan alam yang mencapai 33,7 juta hektar, dan dihuni oleh 4,30 juta jiwa. Papua juga menjadi provinsi yang masih berkembang dalam hal ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Papua adalah daerah yang masih tertinggal dibanding dengan daerah lain di wilayah Indonesia. Ketertinggalan tersebut juga disebabkan oleh belum meratanya pendidikan yang ada di Papua.

Tantangan pemerataan pendidikan di Papua di antara lain adalah:

1. Kualitas sekolah beserta fasilitas di dalamnya

Hal ini bisa ditemukan masih banyaknya kurang terjamah sekolah di pedalaman Papua karena sulitnya akses dan keterbatasan fasilitas. Hal itu

⁴⁷ Angela A Setiyowidi, "Pendidikan Yang Tertinggal Di Daerah Terpencil," Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022, <https://www.uinsaid.ac.id/id/pendidikan-yang-tertinggal-di-daerah-terpencil>.

seringkali ditemukan masih banyaknya bangunan yang tidak sesuai dengan standar yang ada, seperti hanya memiliki tiga ruangan padahal ada enam tingkatan dalam sekolah dasar, bangunan dalam kondisi tidak baik atau bahkan mau roboh, dan jarak tempuh sekolah dan juga pemukiman yang jauh.

2. Kemampuan Siswa yang Tertinggal

Hal ini mempengaruhi tingkat pendidikan Papua khususnya kondisi infrastruktur dalam usaha mengakses pendidikan. Jarak yang jauh dengan tidak adanya tunjangan fasilitas yang memadai seperti kendaraan umum, membuat anak-anak enggan untuk bersekolah.

3. Keterbatasan Tenaga Pendidik

Guru di Papua mempunyai jumlah yang sedikit. Hal ini diperburuk dengan kualitas guru yang masih belum memadai seperti kurang terampilnya dalam melihat dan memberi perhatian dalam pentingnya pembenahan pendidikan. Secara keseluruhan, guru di Papua memiliki kompetensi masih minim. Kebanyakan guru yang ada di sekolah Papua adalah guru di bidang agama, namun harus mengajari bidang lain.

4. Siswa yang Putus Sekolah

United Nations Children's Fund (UNICEF) berpendapat bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Hal ini lebih buruk di pedalaman Papua yang sekitar 50% siswa Sekolah dasar dan 73% siswa Sekolah Menengah Pertama memilih untuk putus sekolah. Hal itu bisa terjadi karena adanya kurang motivasi dari orang tua dalam mendorong untuk anak meraih pendidikan. Kebanyakan para orang tua dan terkhusus untuk yang masih berada di wilayah pedalaman masih menganggap sekolah adalah suatu hal tidak

penting dan masih lebih baik bekerja berkebun untuk meringankan dan membantu ekonomi keluarga⁴⁸.

2.1.2 Data Angka Permasalahan Anak di Indonesia

Adanya anak yang tidak sekolah membawa dampak kurang baik bagi Indonesia yang salah satunya adalah tumbuhnya angka buta huruf. Salah satu alasan tingginya angka buta huruf di Indonesia adalah masih adanya diskriminasi, mulai dari angka putus sekolah hingga pengelolaan dan perencanaan kelas. Anggaran Pendapatan Sekolah (RAPBS) tidak disusun berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender. Di sisi lain, buta huruf selalu dikaitkan dengan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan, serta merupakan salah satu faktor penghambat peradaban dan pembangunan. Faktor-faktor penyebab buta huruf di Indonesia antara lain:

- 1) Jumlah anak putus sekolah dasar tinggi (SD).
- 2) Kondisi geografis Indonesia yang sulit.
- 3) Munculnya buta huruf baru.
- 4) Pengaruh faktor sosiologis dan sosial dalam masyarakat
- 5) Kembali menjadi buta huruf⁴⁹

Badan Pusat Statistik Nasional merilis adanya angka buta aksara menurut provinsi dan juga kelompok umur yang diukur berdasarkan persentase.

⁴⁸ Amy Mustauda, "Apakah Pendidikan Di Papua Sudah Baik?," Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023, <https://www.uinsaid.ac.id/id/apakah-pendidikan-di-papua-sudah-baik>.

⁴⁹ AGUS Tri TRI WAHYUDI, "PENGARUH FAKTOR SOSIAL DAN EKONOMI ORANG TUA TERHADAP BUTA AKSARA ANAK USIA SEKOLAH DI KECAMATAN SUMBER WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO," *Swara Bhumi* 1, no. 2 (20122), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/887>.

Tabel angka buta aksara menurut provinsi, kelompok umur dalam persentase

38 Provinsi	15+		15-44		45+	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
ACEH	1.75	1.66	0.13	0.13	4.96	4.61
SUMATER UTARA	0.89	0.83	0.24	0.13	2.11	2.09
SUMATERA BARAT	0.71	0.69	0.12	0.07	1.7	1.74
RIAU	0.82	0.82	0.07	0.04	2.42	2.38
JAMBI	1.9	1.84	0.18	0.1	5.14	4.62
SUMATER	1.35	1.27	0.27	0.13	3.28	3.27
BENGKULU	2.2	2.11	0.25	0.09	5.87	5.41
LAMPUNG	2.75	2.67	0.28	0.31	6.91	6.35
KEP. BANGKA BELITUNG	1.83	1.76	0.42	0.25	4.52	4.26
KEP. RIAU	0.98	0.95	0.15	0.12	2.85	2.75
DKI JAKARTA	0.31	0.31	0.08	0.09	0.68	0.68
JAWA BARAT	1.51	1.49	0.13	0.07	3.93	3.74
JAWA TENGAH	5.74	5.66	0.74	0.29	12.78	12.43
DI YOGYAKARTA	4.85	4.41	0.22	0.28	10.34	9.68
JAWA TIMUR	6.68	6.3	0.94	0.41	14.28	13.32
BANTEN	1.84	1.77	0.33	0.07	4.86	4.54
BALI	4.47	4.39	0.4	0.25	9.92	9.86
NUSA TENGGARA BARAT	11.03	10.89	2.79	1.51	26.75	26.48
NUSA TENGGARA TIMUR	5.37	4.89	1.75	1.32	12.3	11.22
KALIMANTAN BARAT	6.04	5.21	1.46	0.59	14.92	13.42
KALIMANTAN TIMIUR	0.88	0.97	0.08	0.1	2.5	2.45
KALIMANTAN TENGAH	1.64	1.63	0.24	0.12	4.2	3.92
KALIMANTAN SELATAN	1.03	0.99	0.24	0.06	2.59	2.53
KALIMANTAN UTARA	2.29	2.22	0.77	0.43	5.48	5.4
SULAWESI UTARA	0.19	0.21	0.07	0.04	0.34	0.42
SULAWESI TENGAH	1.95	1.86	0.58	0.4	4.57	4.35

SULAWESI SELATAN	6.69	6.17	1.77	1.12	15.08	13.76
SULAWESI TENGGARA	4.21	3.97	0.82	0.52	11.21	10.5
GORONTALO	1.58	1.51	0.6	0.55	3.41	3.06
SULAWESI BARAT	6.18	5.67	1.85	1.37	15.4	13.41
MALUKU	0.6	0.53	0.31	0.15	1.19	1.24
MALUKU UTARA	1.22	1.19	0.16	0.08	3.57	3.3
PAPUA BARAT	2.36	2.16	0.98	0.87	5.65	5.18
PAPUA	18.81	15.78	15.09	12.84	28.35	22.26
INDONESIA	3.65	3.47	0.75	0.47	8.48	8.04

Tabel 2. Data 33 Provinsi Persentase Angka Buta huruf di Indonesia rentang tahun 2022-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional

Berdasarkan data angka buta huruf Indonesia tahun 2022 dan 2023 pada usia 15 tahun keatas, Provinsi Jawa Timur mencatat penurunan dari 4,85% pada tahun 2022 menjadi 4,41% pada tahun 2023. Penurunan sebesar 0,44% ini mencerminkan keberhasilan program literasi negara. Meskipun angka buta huruf di Provinsi Jawa Timur masih tergolong tinggi dibandingkan beberapa provinsi lainnya, seperti Provinsi Jawa Barat (0,31%) dan Provinsi Sulawesi Tengah (0,21%), namun kemajuan tersebut turut membantu pemberantasan buta huruf di provinsi tersebut upaya kami untuk melakukannya berada pada jalur yang benar. Namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kemampuan melek huruf yang lebih baik. Provinsi dengan angka buta huruf tertinggi pada tahun 2023 antara lain Nusa Tenggara Timur (10,89%), DI Yogyakarta (5,66%), dan Banten (6,3%), sedangkan provinsi lain yang mengalami penurunan signifikan antara lain Kalimantan Timur (dari 6,04% menjadi 5,21%) dan Kalimantan. Barat (5,37% hingga 4,89%). Mengingat masih terdapat provinsi lain yang

angka buta hurufnya rendah, maka upaya pemberantasan buta huruf di Provinsi Jawa Timur perlu lebih digencarkan agar mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Dengan tetap fokus pada program literasi yang efektif, diharapkan angka buta huruf di Provinsi Jawa Timur akan terus menurun hingga setara dengan provinsi dengan angka melek huruf yang lebih tinggi. Untuk menghilangkan buta huruf.

Berdasarkan data angka buta huruf Indonesia tahun 2022 dan 2023 pada rentan usia 15-44 tahun, Provinsi Jawa Timur mencatat penurunan yang signifikan dari 0,94% pada tahun 2022 menjadi 0,41% pada tahun 2023. Penurunan sebesar 0,53% ini mencerminkan keberhasilan upaya negara dalam memberantas buta huruf. Dibandingkan dengan provinsi lain, Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (0,74% menjadi 0,29%) dan Provinsi Jawa Barat (0,13% menjadi 0,07%); Namun meski mengalami penurunan yang signifikan, angka buta huruf di Jawa Timur masih lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi yang angka buta hurufnya sangat rendah, seperti Riau (0,04%) dan Sumatera Barat yang masih tinggi. Di sisi lain, provinsi dengan angka buta huruf yang tinggi seperti Nusa Tenggara Timur (1,32%) dan Papua (12,84%) menunjukkan bahwa buta huruf masih menjadi tantangan di beberapa daerah. Oleh karena itu, meskipun terdapat kemajuan yang baik, provinsi Jawa Timur perlu lebih memperkuat program literasinya untuk mencapai tingkat melek huruf yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dengan tingkat buta huruf yang rendah.

Berdasarkan data angka buta huruf Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 dalam rentan usia 45 keatas, Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan dari 14,28% pada tahun 2022 menjadi 13,32% pada tahun 2023. Penurunan sebesar 0,96% ini mencerminkan upaya signifikan untuk mengurangi angka buta huruf di negara bagian tersebut. Meski demikian, angka buta huruf di Jawa Timur masih tergolong tinggi dibandingkan beberapa

provinsi lain seperti DKI Jakarta (0,68%), Sulawesi Utara (0,42%), dan Maluku (1,24%). Hal ini menunjukkan bahwa meski mengalami kemajuan, Jawa Timur masih memerlukan upaya besar untuk mencapai angka melek huruf yang lebih baik. Di sisi lain, beberapa provinsi dengan angka buta huruf yang tinggi seperti Nusa Tenggara Barat (26,48%) dan Papua (22,26%) menunjukkan bahwa buta huruf masih menjadi tantangan utama di beberapa wilayah di Indonesia. Penurunan Jatim sebesar 0,96% merupakan pertanda positif, namun nilai 13,32% pada tahun 2023 menunjukkan masih banyak yang harus dilakukan untuk semakin menurunkan nilai tersebut. Upaya pemberantasan buta huruf di Jawa Timur harus terus diperkuat melalui strategi yang efektif agar mencapai hasil yang lebih baik di masa depan dan menjadikan tingkat melek huruf setara dengan provinsi yang angka buta hurufnya lebih rendah⁵⁰.

Hal tersebut mendorong adanya anak yang putus sekolah, anak putus sekolah adalah anak usia sekolah yang tidak terdaftar atau tidak mengikuti sekolah formal pada tingkat dasar atau menengah selama jangka waktu tertentu. Di Indonesia, fenomena anak tidak bersekolah seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kemiskinan, sulitnya mengakses lembaga pendidikan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Anak-anak yang tidak bersekolah berisiko kehilangan keterampilan dan pengetahuan yang mereka perlukan di masa depan, sehingga menciptakan hambatan terhadap pertumbuhan pribadi dan kemajuan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi masalah ini melalui langkah-langkah kebijakan yang efektif dan dukungan komprehensif dari pemerintah dan masyarakat.

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Nasional, "Angka Buta Aksara Menurut Provinsi Dan Kelompok Umur (Persen), 2021-2023" (Jakarta, 2023), <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAYlzl=/angka-buta-aksara-menurut-provinsi-dan-kelompok-umur--persen-.html>.

Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin,
2022-2023

Jenis Kelamin + Jumlah	Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin					
	SD / Sederajat		SMP / Sederajat		SMA / Sederajat	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Laki-laki	0.8	0.68	7.77	7.97	24.56	23.78
Perempuan	0.62	0.66	6.06	5.86	20.35	19.34
Laki-laki + Perempuan	0.71	0.67	6.94	6.93	22.52	21.61

Tabel 3. Data Laki-Laki atau Perempuan Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan 2022-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional

Data ini menunjukkan jumlah anak putus sekolah di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan dan gender pada tahun 2022 dan 2023. Pada tingkat SD dan sederajat, jumlah anak laki-laki yang putus sekolah mengalami penurunan dari 0,8% pada tahun 2022 menjadi 0,68% pada tahun 2023. Di sisi lain, jumlah siswa perempuan yang tidak bersekolah sedikit meningkat dari 0,62%. Secara keseluruhan, jumlah anak putus sekolah pada tingkat SD/sederajat mengalami penurunan dari 0,71% pada tahun 2022 menjadi 0,67% pada tahun 2023. Pada tingkat menengah/setara, jumlah laki-laki semakin berkurang. Proporsi tidak bersekolah tercatat sedikit meningkat dari 7,77% pada tahun 2022 menjadi 7,97% pada tahun 2023.

Di sisi lain, jumlah anak perempuan yang tidak bersekolah mengalami penurunan dari 6,06% pada tahun 2022 menjadi 5,86% pada tahun 2023. Jumlah anak yang tidak bersekolah pada tingkat menengah dan sederajat tetap stabil yaitu sebesar 6,94% pada

tahun 2022 dan 6,93% pada tahun 2023. Pada tingkat SMA atau sederajat, jumlah anak laki-laki putus sekolah akan menurun dari 24,56% pada tahun 2022 menjadi 23,78% pada tahun 2023, dan jumlah anak putus sekolah anak perempuan juga akan menurun dari 20,35% pada tahun 2022 menjadi 23,78 pada tahun 2023. Senebtara 19,34% pada tahun 2023. Secara keseluruhan, jumlah anak yang tidak bersekolah di SMP/sederajat mengalami penurunan dari 22,52% pada tahun 2022 menjadi 21,61% pada tahun 2023⁵¹.

Pakar pendidikan Universitas Papua, Dr Agus Irianto Sumule berpendapat bahwa masalah pendidikan di Papua paling fundamental adalah ketersediaan guru sebagai masalah dan juga solusi paling dasar. Dr Agus Irianto menambahkan bahwa di Papua terdapat 620 ribu anak di jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat tidak sekolah atau tidak menyelesaikan pendidikan. Penyebab yang kompleks maka dibutuhkan kecermatan dalam menyelesaikan karena berbagai macam tantangan dan hambatan yang ada⁵².

Biaya pendidikan yang mahal adalah salah satu hambatan terwujudnya pendidikan yang merata di semua lini sosial masyarakat Indonesia. Semakin berkualitas atau tingginya pendidikan maka semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut adalah beban bagi masyarakat menengah kebawah. Banyak dari masyarakat lebih tidak mengenyam pendidikan atau berhenti bersekolah dari pada harus mengeluarkan biaya yang relative besar bagi mereka. Idris berpendapat bahwa masalah pendidikan melahirkan

⁵¹ Badan Pusat Statistik Nasional, "Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin, 2022-2023," Badan Pusat Statistik, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4NiMy/angka-anak-tidak-sekolah-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html>.

⁵² Nurhadi Sucahyo, "Lebih 600 Ribu Anak Papua Tak Sekolah, Apa Yang Salah?," VOA Indonesia, 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/lebih-600-ribu-anak-papua-tak-sekolah-apa-yang-salah-/7153107.html>.

dampak negatif di dalam lini kehidupan bermasyarakat seperti meningkatnya pengangguran, meningkatnya kriminalitas, dan meningkatnya pula kemiskinan⁵³.

Tantangan lain dalam pendidikan di Indonesia adalah aksesibilitas dan kesetaraan. Aksesibilitas pertama ialah terkait dengan adanya kondisi geografis Indonesia terutama di wilayah tertentu seperti pedalaman atau pulau-pulau terpencil yang masih sulit terjangkau. Adanya hal tersebut menjadi sulit untuk mendirikan dan pemeliharaan sekolah. Hal tersebut lahir suatu kesulitan yang dirasakan oleh pemerintah dan siswa karena adanya hambatan mobilitas. Badan Pusat Statistik Indonesia merilih bahwa penduduk Indonesia pada rentan usia 15 tahun keatas sebesar 59,62% masih berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau lebih rendah dari itu. Selain itu masih ada 302 kecamatan di Indonesia tidak memiliki SMP dan 727 kecamatan di Indonesia tidak memiliki SMA. Selain itu kualitas pendidikan di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua pada tahun 2021 menempati posisi paling rendah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 33,58% penduduk yang tidak memiliki ijazah sekolah dengan usia 15 tahun keatas. Pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan persentase 94,69%, Di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 80,66% dan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 63,81% dari Angka Partisipasi Kasar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menambahkan adanya hal tersebut membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua menjadi Provinsi terendah diantara provinsi lain di Indonesia. IPM sendiri dipengaruhi oleh

⁵³ Ibid, Hlm 132

berbagai hal yang salah satunya pendidikan. Pendidikan memiliki kontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia⁵⁴.

Indonesia adalah negara kepulauan yang jumlah penduduknya mencapai 270 juta jiwa. Pendidikan yang berkualitas melahirkan suatu harapan untuk kemajuan negara. Pendidikan tidak hanya sebagai wadah untuk Agen Perubahan (Agent of Change) tetapi juga menjadikan sebagai pemupuk generasi penerus suatu negara yang bisa menciptakan suatu kemajuan atau transformasi (Agent of Producer). Saat ini pendidikan di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya pendidikan di Indonesia telah terbagi dalam tiga jalur Formal, Non-Formal, dan Informal. Di dalam suatu sistem tentidak tidak selalu ada kelebihan dan keberhasilan, selalu aka nada kekurangan dan keagal. Namun kinerja dalam suatu sistem akan juga menghasilkan kualitas jika di jalankan dengan baik. Di dalam realita pendidikan Indonesia, masih banyak pula masalah pendidikan yang menjadikan tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.⁵⁵

Pendidikan Indonesia adalah salah satu aspek kritis dalam suatu pembangunan bangsa Indonesia. Meskipun terdapat berbagai macam kemajuan, tapi banyak masalah yang juga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Masalah tersebut dianantara lain adalah:

1. Keterbatasan Akses Pendidikan

Salah satu masalah pendidikan di Indonesia adalah kerterbatasan dalam mengakses pendidikan. Hal ini bisa terjadi di berbagai daerah terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil. Banyak anak tidak dapat mengakses pendidikan

⁵⁴ Raisya Maulana, "Kesenjangan Mutu Pendidikan di Wilayah Timur Indonesia," 2022, https://www.researchgate.net/publication/365893465_Kesenjangan_Mutu_Pendidikan_di_Wilayah_Timur_Indonesia.

⁵⁵ Dwi Anugrah, "Masalah Pendidikan Yang Umum Terjadi Di Indonesia," Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2023, <https://fkip.umsu.ac.id/masalah-pendidikan-yang-umum-terjadi-di-indonesia/>.

yang berkualitas baik karena jarak yang jauh, keterbatasan transportasi, dan juga akses jalan yang sulit.

2. Kualitas Guru

Salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam pengajaran adalah adanya guru yang memiliki kualitas memadai. Kurangnya dari segi aspek pelatihan sertifikasi, dan kesejahteraan maka kurang menarik bagi guru untuk meningkatkan kompetensi yang menghasilkan guru berkualitas dan bisa menjadi merugikan pendidikan.

3. Kurikulum yang Tidak Relevan

Kurikulum di Indonesia masih dianggap tidak memadai dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada pasar kerja. Perlu adanya revolusi terhadap kurikulum yang bisa memastikan untuk siswa dilatih terhadap keterampilan yang relevan dalam dunia kerja yang modern.

4. Kesenjangan Pendidikan Antar Daerah

Kesenjangan yang terjadi antar daerah seperti yang terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses, hingga fasilitas yang berbeda menjadi kesenjangan tersebut menjadi salah satu masalah. Perlu adanya pemerataan antar daerah pedesaan dan perkotaan agar menciptakan peluang pendidikan yang sama bagi semua anak di berbagai tempat.

5. Kurangnya Fasilitas Pendidikan

Beberapa sekolah masih terjadi kurangnya fasilitas dasar seperti ruang kelas yang kurang memadai, perpustakaan, dan juga laboratorium. Solusi pada permasalahan ini adalah dengan adanya sumberdaya yang memadai untuk mendanai berbagai aspek dari pendidikan tersebut.

6. Masalah Kesejahteraan Siswa.

Adanya biaya pendidikan yang tinggi maka membuat hal tersebut menjadi suatu hambatan bagi sejumlah siswa. Program beasiswa dan juga bantuan keuangan adalah hal yang penting untuk diadakan dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap anak di berbagai lapisan masyarakat merasakan dan memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lain dalam hal mendapatkan pendidikan.

7. Kemiskinan dan Putus Sekolah.

Kondisi ekonomi atau kesejahteraan keluarga bisa memaksa anak-anak secara langsung atau tidak langsung untuk menjadikan putus sekolah. Program bantuan sosial dan juga pembangunan ekonomi adalah salah satu solusi strategis yang bisa dilakukan untuk menekan angka putus sekolah, sehingga melahirkan harapan anak-anak di berbagai lapisan masyarakat.

8. Ketidaksetaraan Gender.

Gender adalah isu yang juga menjadi masalah bagi negara, karena kesenjangan terhadap gender bisa melahirkan perundungan ataupun pembulian. Oleh karena itu kesadaran terhadap kesetaraan gender di bidang pendidikan menciptakan kesetaraan yang akhirnya tidak diskriminatif terhadap orientasi atau jenis kelamin tertentu yang memiliki kesempatan yang sama.

9. Kurangnya Keterlibatan Orang Tua

Keterlibatan orangtua adalah salah satu faktor yang penting dalam proses belajar. Sering kali ditemui partisipasi orang tua dalam pendidikan seringkali rendah. Keterlibatan orang tua dan juga peningkatan kesadaran akan hal itu dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan.

10. Tingginya Angka Pengangguran Pasca Lulus Sekolah.

Masalah serius yang lain adalah tingginya Tingkat pengangguran antar lulusan. Perlu adanya kerjasama antar institusi pendidikan dan juga dunia industry dalam memastikan lulusan tersebut memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Melalui pemahaman akan pentingnya skill bagi para siswa meningkatkan motivasi dan juga daya saing untuk menciptakan SDM terampil.⁵⁶

2.2 Kondisi Pendidikan di Jember

Jember merupakan wilayah strategis di Provinsi Jawa Timur, terletak di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro menghadap Laut Indonesia. Jember dalam sejarahnya merupakan kota administratif, namun pada tahun 2001 kembali menjadi bagian dari kabupaten. Dengan luas wilayah 3.293,34 km², Jember mempunyai topografi yang bervariasi mulai dari dataran lembah subur hingga pegunungan tinggi. Keanekaragaman ekosistem, mulai dari dataran rendah di selatan hingga pegunungan di barat laut, memperkaya keanekaragaman kawasan ini. Karena iklim tropis dan perubahan ketinggiannya, Jember kaya akan sumber daya alam, termasuk taman nasional dan beberapa sungai besar yang merupakan sumber air penting.

Penduduk Jember sebagian besar terdiri dari suku Jawa dan Madura yang mayoritas beragama Islam. Interaksi budaya Jawa dan Madura menciptakan budaya Pendalungan yang unik. Perekonomian Jember didominasi oleh sektor pertanian, khususnya perkebunan tembakau yang terkenal secara internasional. Perkebunan ini pada dasarnya merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda dan kini dikelola oleh perusahaan nasional dan daerah. Selain pertanian, perdagangan dalam negeri dan ekspor juga memberikan dukungan ekonomi,

⁵⁶ PSF School Development, "Masalah Pendidikan Di Indonesia: Menganalisis 10 Tantangan Utama Dan Solusinya," PSF School Development, 2023, <https://psfoutreach.com/masalah-pendidikan-menganalisis-10-tantangan-utama-dan-solusinya/>.

dengan bahan baku utama adalah hortikultura, perkebunan, batu, furnitur, dll. Dengan berkembangnya berbagai usaha dan industri di kecamatan tersebut, Kabupaten Jember mempunyai potensi perekonomian yang besar⁵⁷.

Perekonomian Jember dipengaruhi oleh Sembilan sektor usaha yang diantaranya adalah, Pertanian, Industri, listrik, air minum, banugnan, perdagangan (Hotel dan restoran), angkutan umum dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lain, dan juga jasa. Kesembilan sektor tersebut adalah sektor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator penting dalam identifikasi suatu wilayah dalam melihat hasil produksi baran dan jasa yang dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan. Sektor pertanian adalah sektor tertinggi penyumbang PDRB di Kabupaten Jember⁵⁸.

Sektor pertanian juga menjadi sektor tertinggi dalam berkontribusi dalam PDRB Kabupaten Jember dan menjadikan lapangan usaha terbuka terbesar di Jember. Dominasi Jember adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbang 25,76 persen penyumbang PDRB Kabupaten Jember lalu diikuti oleh Sektor Industri dengan 20,89 persen⁵⁹. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh atau memperoleh penghasilan, tunjangan, atau upah/gaji.

Angkatan kerja mencerminkan angkatan kerja yang terserap ke dalam pasar tenaga kerja. Jumlah penduduk kerja di Provinsi Jember sebanyak 1,3 juta

⁵⁷ BPK Perwakilan Provinsi Jember, "Kabupaten Jember," BPK Perwakilan Provinsi Jember, n.d., <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/>.

⁵⁸ Miftahul Rochman, Badjuri, and Agus Luthfi, "Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2010 – 2013," Artikel Ilmiah Mahasiswa (Jember, 2015), [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/64335/MIFTAHUL ROCHMAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/64335/MIFTAHUL%20ROCHMAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember" (Jember, 2023), <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2024/03/01/304/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-jember-2023.html>.

orang pada Agustus 2022. Selanjutnya, karakteristik angkatan kerja ditampilkan berdasarkan pekerjaan utama, jenis pekerjaan utama, dan tingkat pendidikan tertinggi. Komposisi angkatan kerja menurut sektor pekerjaan utama memungkinkan kita menjelaskan keadaan partisipasi pasar tenaga kerja di setiap sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, komposisi angkatan kerja dibedakan berdasarkan tiga sektor ketenagakerjaan: Sektor jasa menyerap jumlah tenaga kerja terbesar yaitu sebesar 42,06%. Sektor Pertanian menyerap 37,55 % angkatan kerja. Industri pengolahan menduduki peringkat ketiga dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 20,39%⁶⁰.

Pemerataan pendidikan adalah salah satu tantangan bagi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Jember. Pada Jenjang pendidikan formal perluasan akses bagi anak-anak menjadi perhatian khusus karena belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik, dan termasuk dalam pendidikan dasar (Sekolah Dasar/SD). Anak-anak yang tergolong dalam perhatian serius adalah anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan potensi terkait bakat dan juga kecerdasan.

Faktor yang mendominasi menjadi faktor utama terjadinya Anak Putus Sekolah (ATS) adalah faktor ekonomi. Pendidikan adalah aktivitas yang dilakukan manusia sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, dan juga sebagai usaha pembangunan nasional suatu bangsa. Pemerataan pendidikan yang diusahakan pemerintah untuk ditekan atau diatasi bertujuan untuk agar seluruh masyarakat memperoleh hak-hak dasar yang sama dalam akses pendidikan dengan

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, "Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Jember Tahun 2022" (Jember, 2022), <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2022/12/30/260/keadaan-ketenagakerjaan-kabupaten-jember-tahun-2022.html>.

tidak membeda bedakan golongan dan juga status tertentu. Dengan demikian tidak tercipta kesenjangan antara perbedaan masyarakat kota dan desa⁶¹.

Jember mempunyai permasalahan pendidikan yang menjadikan perhatian serius dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Permasalahan tersebut adalah Anak Tidak Sekolah. Pada tahun pendidikan 2022-2023 Jember menempati posisi tertinggi dari 38 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur sebagai kabupaten yang mempunyai angka anak putus sekolah⁶². Hal ini diperkuat data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur

Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Status Pendidikan,2023

Kabupaten/ Kota	Laki-Laki dan Perempuan							
	Tidak /belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah					Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/SMK/ MA/Paket C	D1/D2/D3	D4/S1/Profesi/ S2/S3		
Kabupaten								
Pacitan	0.25	34.73	15.75	15.15	0.00	3.62	30.49	100.00
Ponorogo	0.26	35.50	15.62	15.17	0.37	4.84	28.24	100.00
Trenggalek	0.52	34.09	18.45	14.71	0.18	3.01	29.05	100.00
Tulungagung	0.27	37.68	13.96	13.71	0.26	6.43	27.68	100.00
Blitar	0.68	35.26	16.80	12.99	0.00	4.83	29.45	100.00
Kediri	0.47	36.24	13.65	14.89	0.34	7.15	27.27	100.00
Malang	0.22	34.36	14.15	11.91	0.24	9.84	29.28	100.00
Lumajang	0.40	35.41	16.01	9.71	0.13	4.73	33.60	100.00
Jember	0.66	33.22	16.80	14.16	0.16	7.07	27.93	100.00
Banyuwangi	0.60	37.90	14.54	12.70	0.00	5.41	28.85	100.00
Bondowoso	0.61	37.57	11.81	11.52	0.00	4.69	33.80	100.00
Situbondo	0.51	31.53	13.72	14.05	0.00	3.87	36.31	100.00

⁶¹ Lukman Hakim, "PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN BAGI RAKYAT SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL," *Jurnal EduTech* 2, no. 1 (2016), https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575/pdf_14.

⁶² Portal Data KEMENDIKBUDRISTEK, "Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Tingkat Tiap Provinsi (Prov. Jawa Timur) Tahun 2022/2023 SD," 2023, <https://data.kemdikbud.go.id/dataset/detail/15/L1-050000/2022/SD-1#filter-section>.

Probolinggo	0.29	36.66	12.24	12.34	0.00	5.79	32.68	100.00
Pasuruan	0.72	33.11	14.67	11.45	0.30	4.72	35.03	100.00
Sidoarjo	0.06	34.63	12.23	16.59	0.00	12.12	24.37	100.00
Mojokerto	0.06	32.03	18.23	14.21	0.00	4.95	30.52	100.00
Jombang	0.21	34.82	14.57	17.16	0.05	6.31	26.88	100.00
Nganjuk	0.09	36.15	16.13	15.30	0.19	4.58	27.55	100.00
Madiun	0.39	34.32	18.94	15.08	0.07	5.57	25.63	100.00
Magetan	0.22	37.64	14.24	17.73	1.30	5.27	23.60	100.00
Ngawi	0.10	34.84	15.18	16.15	0.52	3.70	29.50	100.00
Bojonegoro	0.16	37.17	15.05	13.96	0.33	5.51	27.82	100.00
Tuban	0.30	33.98	13.75	12.93	0.00	4.21	34.83	100.00
Lamongan	0.12	34.96	12.34	14.65	0.00	8.97	28.96	100.00
Gresik	0.41	33.93	14.00	15.11	0.63	9.25	26.67	100.00
Bangkalan	0.61	35.53	16.30	9.85	0.25	3.90	33.56	100.00
Sampang	1.19	37.20	13.62	12.12	0.00	4.56	31.30	100.00
Pamekasan	0.43	35.89	12.31	10.87	0.14	7.91	32.45	100.00
Sumenep	1.52	32.68	16.82	13.68	0.00	5.59	29.71	100.00
Kota								
Kediri	0.13	29.15	13.19	19.53	0.67	10.05	27.27	100.00
Blitar	0.34	34.29	15.63	15.75	0.88	9.60	23.51	100.00
Malang	1.41	26.33	12.80	15.19	0.73	20.67	22.86	100.00
Probolinggo	0.27	39.79	16.74	16.60	0.13	5.32	21.15	100.00
Pasuruan	0.23	31.95	17.07	14.37	0.00	6.83	29.54	100.00
Mojokerto	0.51	34.81	13.73	16.02	0.00	8.21	26.72	100.00
Madiun	0.20	34.31	14.91	15.34	0.50	9.79	24.96	100.00
Surabaya	0.84	28.80	11.84	13.84	0.33	16.16	28.20	100.00
Batu	0.45	32.58	16.11	14.64	0.00	12.35	23.87	100.00
Jawa Timur	0.48	34.27	14.46	13.83	0.20	7.67	29.10	100.00

Tabel 4. Data Wilayah di Jawa Timur dalam Menurut Jenis Kelamin dan Menurut Status Pendidikan

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Dalam konteks Kabupaten Jember, data menunjukkan bahwa sekitar 66% penduduknya telah mengakses pendidikan dasar (SD/MI/ Paket A) dan sebagian besar masih dalam tahap pendidikan menengah pertama (SMP/MTs/ Paket B) dengan persentase sekitar 33%. Tingkat pendidikan menengah atas (SMA/SMK/ MA/Paket C) mencapai sekitar 16.80% dan pendidikan tinggi (D1/D2/D3, D4/S1/Profesi/ S2/S3) sekitar 7.23%. Angka

ketidaksekolahan dan tidak bersekolah lagi relatif rendah, masing-masing sekitar 0.82% dan 0.16%.

Dibandingkan dengan Malang dan Surabaya. Keduanya memiliki akses yang baik terhadap pendidikan dan sebagian besar penduduknya memiliki gelar sarjana (S1/D4 atau lebih tinggi). Yang perlu diperhatikan, angka pendidikan tinggi di Malang sebesar 20,67%, sedangkan di Surabaya sebesar 16,16%. Kota-kota besar ini umumnya memiliki infrastruktur pendidikan yang lebih canggih dan akses yang lebih mudah ke berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga universitas, Namun demikian, tantangan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pendidikan masih menjadi fokus utama di Jawa Timur, termasuk Jember⁶³.

Program yang pemerintah prioritaskan dalam bidang pendidikan adalah pembangunan pendidikan mulai dari wilayah pinggir dengan cara memperkuat suatu wilayah dan desa agar tetap dalam kerangka NKRI. Pendidikan dimaknai dengan suatu sarana di dalam pengembangan diri, keterampilan serta pengetahuan yang bisa mencapai suatu kesejahteraan negara dan bangsa. Indonesia bisa memperoleh pendidikan melalui pendidikan formal maupun non formal. Lembaga formal merupakan lembaga yang utama dalam pengembangan pengetahuan peserta didik, melatih keterampilan serta kemampuan masing-masing siswa di bawah pemerintah. Pendidikan Indonesia dalam prosesnya mengalami kesenjangan dalam segi kualitas pendidikan di suatu daerah. Kesenjangan kualitas tersebut tampak dalam keberadaan sekolah di daerah pedalaman dan juga perbatasan dengan kondisi akses jalan yang sulit di banding dengan sekolah yang berada di wilayah perkotaan.

⁶³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Di Jawa Timur Dirinci Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Dan Status Pendidikan, 2023," Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2024/05/14/3097/persentase-penduduk-usia-7-24-tahun-di-jawa-timur-dirinci-menurut-kabupaten-kota-jenis-kelamin-dan-status-pendidikan-2023.html>.

Pembangunan di Jawa lebih unggul di banding pendidikan di luar Jawa. Hal ini disebabkan karena konsentrasi pembangunan nasional yang dilakukan banyak berfokus di Jawa dan yang memiliki pusat di Ibu Kota Jakarta. Indonesia memiliki akses pendidikan yang masih belum merata ke banyak penjuru sudut negara Indonesia. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di tahun 2017 menyatakan Indonesia masih memiliki ketidakseimbangan atau disparitas antar penduduk yang tinggal berumah tangga dengan status ekonomi yang berpengaruh terhadap pendidikan.

Terhusus di Kabupaten Jember yang terutama di daerah pedalaman, memiliki ketidak merataan akses pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kondisi dari akses jalan yang sulit yang dilalui membuat masyarakat yang menyekolahkan anaknya keluar daerah menjadi lebih sedikit. Salah satu contoh kasus di Kabupaten Jember adalah Dusun Badeali, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Daerah Bandalit adalah daerah yang berada dalam Kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) yang memiliki akses jalan yang kurang baik. Hal ini diperkuat dengan minimnya transportasi yang keluar masuk area Kawasan tersebut. Adanya keterbatasan tersebut membuat pemerataan pendidikan memiliki keterkaitan terhadap akses jalan serta kemudahan bagi masyarakat untuk melaluinya⁶⁴.

Jember memandang pendidikan adalah layanan dasar yang tidak bisa untuk ditawar atau terlepas dalam perhatian pemerintah. Pendidikan adalah *leading sector* yang menjadi kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan. Pemerintah Jember memberikan konsentrasi terhadap pentingnya pengembangan pendidikan di Jember. Perhatian tersebut menjadi semangat Jember dalam mewujudkan pewujudan pendidikan yang berkualitas. Jember tidak hanya berfokus pada pemerataan pelayanan pendidikan pada tingkat Sekolah

⁶⁴ Maria Ulfa, "Potret Kondisi Sekolah Daerah Terpencil Di Dusun Bandalit Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember," *JUPE* 2 1, no. 1 (2023): 11–26, <https://jurnal.stikesbanyuwangi.ac.id/index.php/JUPE2>.

Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi persoalan utama dalam pengembangan pendidikan Jember, tetapi Jember tidak menutup kemungkinan untuk pemerintah tidak menutup kesempatan kepada sekolah swasta. Sekolah swasta memiliki kualitas yang cukup memumpuni yang mampu bersaing dan memiliki jumlah yang cukup banyak. Sarana dan prasana infrastruktur sekolah swasta adalah kebutuhan pokok yang harus diperhatikan. Hal ini adalah penunjang belajar dan mengajar agar semakin berkualitas⁶⁵.

Kepala Dinas Pendidikan Jember, Hadi Mulyono berpendapat bahwa masih ada sekolah yang masih dalam keadaan kekuarangan tenaga pendidik. Hal tersebut salah satu masalah pemerintah kabupaten Jember yang masih terus diselesaikan dan juga diperbaiki secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pendidikan Jember juga menambahkan bahwa permasalahan di jember adalah ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang berada di Jember. Pemenuhan sarana dan prasarana yang baik tidak bisa hanya dilakukan oleh perangkat daerah atau lembaga terkait, namun peran serta wali murid dan pihak disekitar sekolah juga memiliki peranan dalam pemenuhan fasilitas tersebut.

Jember memiliki tiga ribu bangunan sekolah negeri dan juga swasta, dan empat ratus bangunan diantaranya memiliki kondisi yang perlu diperhatikan. Adanya kondisi tersebut, sekolah yangn membutuhkan perhatian memiliki prioritas dari pemerintah daerah untuk mendapatkan dana anggaran untuk memperbaiki atau mengembangkan bangunan terebut. Bangunan sekolah yang berada di Jember dirawat dan di perbaiki melalui Dana Alokasi yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, selain itu ada juga dana dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) yang juga bisa dimanfaatkan untuk renovasi sekolah yang membutuhkan. Selain melalui dana tersebut beberapa sekolah juga menerapkan dan

⁶⁵ Radar Jember, "Pemkab Jember Akan Fokus Pada Pemerataan Layanan Pendidikan Pada 2024," Radar Jember, 2023, <https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/793263724/pemkab-jember-akan-fokus-pada-pemerataan-layanan-pendidikan-pada-2024>.

paguyuban sebagai bentuk partisipatif wali murid terhadap perawatan dan pembangunan sekolah⁶⁶.

Jember adalah daerah yang menjadi bagian wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di Kawasan lereng Pegunungan yang dan Pegunungan Argopuro yang membentang dari arah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Jember mempunyai peranan yang strategis dengan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 Km dengan karakter topografi adalah dataran ngarai yang subur di wilayah Tengah dan juga Selatan serta dikelilingi pegunungan dari barat hingga timur.

Kabupaten Jember, secara administratif memiliki 31 Kecamatan, 226 Desa, dan juga 22 Kelurahan. Jember berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sisi barat, Kabupaten Banyuwangi di sisi timur, dan Samudera Hindia di sisi Selatan. Mayoritas penduduk Jember adalah suku Jawa dan Madura yang sebagian besar memiliki kepercayaan dan menganut agama Islam. Selain Jawa dan Madura ada juga suku Tionghoa dan Osing. Dari banyaknya suku tersebut Suku Madura adalah suku yang paling mendominasi kependudukan di Jember⁶⁷.

Jember memiliki fasilitas pendidikan formal dari jenjang paling dasar hingga paling tinggi. Jember mempunyai Taman Kanak-Kanak (TK) atau setara dengan TK yang tersedia lebih dari 1.800 fasilitas. Di jenjang lebih tinggi yaitu Sekolah Dasar (SD) atau setingkat SD tersedia lebih dari 1.300 fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat SMP tersedia lebih dari 500 fasilitas. Di jenjang

⁶⁶ Ilham Wahyudi, "Tantangan Dunia Pendidikan Di Jember, Ratusan Sekolah Rusak, Tenaga Pendidik Kurangan," Radar Jember Jawa Pos, 2024, <https://radarjember.jawapos.com/pendidikan/794607258/tantangan-dunia-pendidikan-di-jember-ratusan-sekolah-rusak-tenaga-pendidik-kurangan>.

⁶⁷ BPK Perwakilan Provinsi Jember, "Kabupaten Jember."

pendidikan formal paling tinggi yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara dengan SMA terdapat lebih dari 300 fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Untuk tingkat perguruan tinggi terdapat Sembilan fasilitas yang bisa dimanfaatkan yang salah satunya adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yaitu Universitas Negeri Jember (UNEJ).

Fasilitas tersebut digunakan untuk 2,4 juta penduduk Kabupaten Jember. Fasilitas tersebut juga di dukung oleh ketersediaan tenaga pengajar sebanyak 6.700 ribu guru di setingkat pendidikan taman kanak kanak, 13.500 guru yang setingkat dengan pendidikan Sekolah dasar (SD), 7.400 guru yang setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 4.900 guru yang setingkat dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ⁶⁸.

Jember dengan segala fasilitas dan juga kapasitas dalam menyelenggarakan pendidikan juga masih memiliki masalah. Masalah tersebut salah satunya Anak Tidak Sekolah (ATS) yang disebabkan oleh kondisi ekoomi, kemiskinan, hingga pengangguran. Menurut Distrik Koordinasi Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan Indonesia Jember (LPKIPI) Solehati berpendapat telah melakukan berbagai program dalam rangka menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) di delapan desa dan empat kecamatan. Program tersebut juga di inisiasi oleh UNICEF dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat⁶⁹.

United Nations Children's Fund (UNICEF) mengungkapkan bahwa ada 4.1 juta anak tidak sekolah di Indonesia. Namun berdasarkan Suvei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di tahun 2020 ada kurang lebih 40 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) mulai dari anak yang putus sekolah hingga anak yang tidak pernah bersekolah sama sekali yang berada di Jember. Ada berbagai faktor atau alasan yang mendasari dari adanya anak tidak

⁶⁸ Rizqi Elviah, "Potret Pendidikan Di Jember," Radar Jember, 2019, <https://radarjember.jawapos.com/opini/791095415/potret-pendidikan-di-jember>.

⁶⁹ Radar Digital, "Tahun Depan Pemkab Jember Akan Sekolahkan Lagi Ribuan Anak Tidak Sekolah," Radar Jember, 2023, <https://radarjember.jawapos.com/pendidikan/793438360/tahun-depan-pemkab-jember-akan-sekolahkan-lagi-ribuan-anak-tidak-sekolah>.

sekolah atau putus sekolah yang terjadi di Jember. Alasan yang paling dominan adalah alasan ekonomi. Ketidak mampuan ekonomi untuk membayar sekolah adalah keluhan mayoritas yang terjadi di Jember, Selain itu ada anak memiliki status Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengakibatkan lahirnya rasa malu karena status kebutuhan khusus tersebut.

Adanya hal tersebut Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember, Joko Sutriswanto berpendapat bahwa ada banyaknya anak yang tidak sekolah juga menjadi perhatian serius pemerintah Jember dengan menempuh berbagai upaya salah satunya adalah menjalin koordinasi dengan UNICEF untuk pendataan banyaknya anak yang tidak sekolah. Hal ini ditegaskan bahwa program tersebut dinilai bagus karena, banyak anak yang tidak sekolah di Jember. Menurut Konsultan Pendidikan Unice, Supriono Subakhir berpendapat bahwa ribuan anak yang tidak sekolah di Jember adalah suatu kegelisahan yang mendasar, padahal ada banyak tempat pendidikan di Jember yang dinilai mapan⁷⁰.

Kementerian Pendidikan, UNESCO, dan UNICEF di tahun 2011 angka Anak Putus Sekolah menunjukkan 2,5 Juta anak Indonesia yang berada di usia 7-15 tahun masih tidak bersekolah. Kebanyakan dari terjadi putus sekolah sewaktu pada masa transisi dari Sekolah Dasar (SD) ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Terkhusus di wilayah Jawa Timur, Menurut data tahun 2018 Badan Pusat Statistik Nasional menunjukkan angka partisipatif sekolah di wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 99,57 untuk Sekolah Dasar (SD), Pada jenjang di atasnya yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 96,77, dan pada jenjang paling tinggi yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) 71,51 dan sekaligus

⁷⁰ Safitri, "40 Ribu Anak Di Jember Putus Sekolah."

Pendidikan Tinggi (PT) masing masing sebesar 23,34. Data tersebut bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin rengah Tingkat partisipasinya⁷¹.

Permasalahan pemerataan pendidikan terhadap Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Jember. Miftakhudidin berpendapat bahwa adanya kasus putus sekolah disebabkan oleh berbagai masalah yang dilematis. Salah satunya adalah benturan antara kewajiban untuk bersekolah dengan adanya kearifan lokal yang berlaku, difabelitas, sosial, dan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh adanya penelitian dari Lateif di tahun 2009 melaporkan adanya faktor internal yang melahirkan ketiadaan untuk motifasi bersekolah. Lahirnya motivasi internal tersebut di sebabkan oleh motivasi ekstrenal yang disebabkan oleh pendidikan orang tua yang rendah, penghasilan yang rendah, dan kultur lingkungan yang kurang mendukung untuk terwujud dan terciptanya masyarakat berpendidikan.

Dalam survey di tahun 2013 masyarakat Jember sudah memahami dan juga mengerti pendidikan formal di sekolah untuk anak-anaknya. Hal tersebut telah berubah yang pernah mengedepankan oleh kepentingan Rohani-religi daripada edukasi yang di lakukan oleh rata rata masyarakat etnis Madura⁷². Kondisi masyarakat Jember yang memiliki pengaruh dalam pendidikan terbagi menjadi empat yaitu.

1. Kondisi Kultur dan Ekonomi

Masyarakat Jember adalah masyarakat yang tergolong sebagai Pandhalungan, yaitu masyarakat yang budayanya hasil dari akulturasi dan asimilasi antara kebudayaan Jawa dan kebudayaan Madura. Bberapa Kawasan di Jember juga masih kental antara Jawa asli, Madura Asli, dan Using dari Banyuwangi. Dari adanya beberapa etnis dan budaya yang ada di Jember,

⁷¹ Miftakhuiddin and Anwar Senen, "Dilema Putus Sekolah Bagi Anak-Anak Masyarakat Tradisional Di Jember, Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah* 6, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.31234/osf.io/d7zqv>.

⁷² Ibid, Hlm 3

kebudayaan Madura menjadi etnis dan budaya yang dominan sehingga dalam berbagai aspek merujuk kepada kebudayaan, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat Madura.

Pola yang berkembang dalam masyarakat Madura asli memiliki pola perilaku yang biasa untuk ramah, sopan, dan polos namun di Madura asil mempunyai kebiasaan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tersebut yan dimaksud adalah bisa di contohkan ada dua orang yang mengawinkan anaknya jika masing masing anak mempunyai anak laki-laki dan Perempuan, mereka wajib untuk menghormati perjanjian tersebut dan menikahkan saat usianya sudah cukup. Hal tersebut tidak jarang melakukan pemalsuan dokume ke KUA agar pernikahan tersebut bisa dilakukan secara SAH.

Perjanjian seperti itu menjadi hal yang dijumpai dalam masyarakat Etni Madura yang tidak jarang dijumpai. Jikalau ada yan tidak menghargai hal tersebut maka hal tesebut maka sama dengan salah satu orang tersebut menodai perjanjian tersebut. Hal ini adalah salah satu hal yang tidak baik karena konsekuensi yang terjadi bisa melakukan Carok. Hal tersebut adalah salah satu faktor yang berkontribusi dalam terjadinya Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terjadi di Jember.

2. Kondisi Personal

Anak anak memiliki pemikiran yang pragmatis, sehingga dengan adanya hal yang dilakukan tapi tidak langsung Nampak maka dianggap sebagai kegiatan yang kurang bermanfaat dan kurang di prioritaskan. Salah satu contoh adalah adanya anak anak yang membantu orang tua dnegan membantu bekerja seperti ke sawah atau menjadi tukang parkir. Hal ini melahirkan pemikiran bahwa kegiatan tersebut membawa dampak langsung meskipun hal ini berakibat malas dan sering

bolos untuk bersekolah. Di sisi lain sekolah adalah tempat belajar, menulis, menghitung dan membaca.

Orientasi terhadap kebendaan yang kental menjadi salah satu dilemma bagi anak untuk memilih baik bersekolah atau meninggalkan sekolah. Namun al ini juga perlu didukung oleh lingkungan yang supportif terhadap perkembangan belajar anak. Anak anak akan kerab merujuk kebeberapa orang yang sukses meskipun definisi sukses tersebut belum matang.

3. Ketimpangan lain.

Ada beberapa penyebab purus sekolah dihasilkan oleh alasan sederhana dan tidak layak untuk dijadikan alasan anak untuk berhenti sekolah. Di salah satu daerah di Kabupaten Jember yang memiliki nama Kecamatan Arjasa memiliki sekolah MTS dengan fasilitas bus anas untuk siswa. Hal ini disebabkan kondisi jalan yang kurang cukup berbaha karena berkelok, terjal dan naik turun.

Adanya fasilitas yang berupa bus siswa tersebut menyebabkan anak anak menimbulkan rasa cemburu. Anak anak melihat bahwa sekolah lain berbeda dengan sekolahnya sendiri sehingga rasa cemburu itu ada. Kecemburuan terebut menjadi suatu ketidakadilan meskipun hal tersebut terkesan sederhana. Adanya ketimpangan adalah salah satu faktor hilangnya semangat anak untuk bersekolah⁷³.

2.3 Kerjasama Pendidikan Anak di Indonesia Bersama UNICEF

Pendidikan adalah kegiatan umum bagi orang orang dan memiliki peran yang penting dalam pembangunan dan mencapai cita-cita bangsa. Melalui *United Nations Children's Fund* (UNICEF) telah melakukan studi tentang Anak Tidak Sekolah

⁷³ Ibid, Hlm 4

(ATS) di Indonesia dan mengidentifikasi dari berbagai faktor yang menyebabkan adanya anak usia sekolah tapi tidak bersekolah.

UNICEF berpendapat bahwa faktor adanya Anak Tidak Sekolah adalah terpicilnya daerah atau suatu wilayah, adanya keenjangan dan ketertinggalan dalam segi pembangunan daerah, kemiskinan dan latar belakang ekonomi keluarga, kurang memadai fasilitas untuk anak-anak yang menyandang disabilitas. Oleh karena itu kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan juga UNICEF menjadi strategi dalam usaha untuk menyelesaikan masalah ATS.

Hal tersebut memiliki tujuan untuk memastikan adanya suatu penguatan, perluasan, perbaikan, serta koordinasi yang lebih baik dan juga lebih efektif dari berbagai program dan juga inisiasi Pemerintah Indonesia dan juga keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan juga pelatihan anak Indonesia. Pemerintah Indonesia mengharapkan adanya kerjasama dengan UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki rekam jejak dalam menangani permasalahan anak di dunia menjadikan pendidikan Indonesia bisa memiliki kepastian bahwa Indonesia mempunyai layanan pendidikan dan pelatihan yang memiliki kualitas baik dan relevan dengan kehidupan atau menghadapi tantangan kerja⁷⁴.

UNICEF dalam rangka untuk menangani Anak Tidak Sekolah atau anak yang beresiko putus sekolah anak-anak yang berusia 3-18 tahun dan juga anak-anak disabilitas dan berada dalam wilayah-wilayah terpinggirkan dengan mengacu rancangan prioritas di masing-masing wilayah bekerjasama dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Adanya inisiasi Indonesia untuk menyelesaikan masalah

⁷⁴ Atikha Sari and Indra Pahlawan, "IMPLEMENTASI KERJASAMA UNICEF DAN INDONESIA DALAM STRATEGI NASIONAL PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (STRANAS ATS) (STUDI KASUS: NAGARI TARUANG-TARUANG TAHUN 2020-2021)," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (2023), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/34716>.

Anak Tidak Sekolah menjadikan UNICEF mengarah pada pembuatan bukti dengan penyediaan data, advokasi kebijakan, dan penguatan sistem untuk mendapatkan akses pendidikan yang adil, peningkatan hasil dari pembelajaran, dan juga pengembangan keterampilan remaja⁷⁵.

UNICEF melakukan upaya Bersama dengan pemerintah Indonesia dengan mengidentifikasi dan mengembangkan solusi inovatif yang bisa dilakukan secara efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. UNICEF mempunyai sistem *piloting* yang memiliki tugas untuk mengembangkan model dalam program kerjasama yang efektif dan *affordable*. Melalui sistem ini, UNICEF mencoba membantu dalam mengatasi masalah nasional yang ada dengan tidak terbatas teori tapi juga pembuktian tawaran UNICEF mampu menjawab masalah yang ada dengan efektif⁷⁶.

Hasil dari sistem tersebut menghasilkan Analisa yang digunakan untuk menerbitkan kebijakan – kebijakan yang relevan dengan integrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar yang jelas. Perencanaan dan implementasi dari usaha penanganan Anak Tidak Sekolah yang didasarkan dari prinsip-prinsip berikut;

1. Strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dikembangkan dengan didasari prioritas kebijakan pembangunan pemerintah yang telah ditetapkan dan dalam semangat memperkuat dan juga meningkatkan kebermanfaatan program yang sudah dijalankan Kementerian atau lembaga terkait.
2. Anak Tidak Sekolah adalah suatu fenomena yang terkait dengan tanggung jawab bersama dengan keluarga, masyarakat, sekolah, dan juga pemerintah dari tingkat pusat maupun tingkatan rendah, dan juga pihak terkait lainnya yang

⁷⁵ Ibid, Hlm 6

⁷⁶ Ibid, Hlm 7

membutuhkan kerjasama dan juga koordinasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dalamnya.

3. Strategi terhadap penanganan Anak Tidak Sekolah di daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah dan juga pihak terkait sebagai respon terhadap konteks permasalahan Anak Tidak Sekolah di daerah tersebut. Dalam hal ini faktor dari adanya anak tidak sekolah dan juga hambatan yang menjadi penghalang partisipasi sekolah di setiap daerah perlu diidentifikasi dan juga di tangani melalui strategi yang dirancang yang juga disesuaikan dengan kondisi sekolah di setiap daerah dan di implementasikan.
4. Solusi beserta strategi penanganan Anak Tidak Sekolah dengan berbasis kearifan lokal yang menjadi dasar replikasi, adaptasi, dan juga perluasan agar stratefi serupa bisa diterapkan di daerah lain maupun diangkat ke tingkat nasional.
5. Pengembangan dari strategi dalam penanganan Anak Tidak Sekolah harus berbasis data dan juga informasi Anak Tidak Sekolah yang akurat, Hal ini menjadikan rujukan dalam perencanaan dan juga penganggaran agar usaha menangani masalah Anak Tidak Sekolah sesuai dengan kondisi dan juga tantangan di daerah terkait⁷⁷.

Indonesia sebagai negara yang memiliki masalah tentang anak yang terkusus pada bidang pendidikan memiliki kerjasama dengan UNICEF untuk menangani masalah tersebut. UNICEF dijadikan Indonesia sebagai organisasi internasional yang memiliki peranan aktif dalam bidang advokasi dan juga secara teknis terjun ke lapangan. Secara

⁷⁷ Ibid, Hlm 8

umum kegiatan UNICEF di Indonesia meliputi keberlangsungan hidup dan keehatan anak, pendidikan, perlindungan anak, gizi, air, sanitasi, dan kebijakan sosial.

UNICEF menjadi inisiator dalam melakukan peranannya di Indonesia dengan merancang atau merekomendasikan negara anggota untuk memformulasi dari suatu kebijakan atau strategi yang dianggap relevan atau juga sejalan dalam menganggulangi permasalahan yang ada di Indonesia khususnya yang melibatkan anak-anak dan juga Wanita. UNICEF juga berperan sebagai fasilitator yang memiliki peran media atau wadah yang bisa dimanfaatkan oleh donator seperti pemerintah, investor, dan sponsor serta masyarakat untuk mengumpulkan donasi yang nantinya digunakan dalam program kerja. UNICEF berupaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk anak di Indonesia. Adanya hal tersebut UNICEF menjalankan program yang dirancang untuk mensejahterakan anak dan juga hak asasi anak di Indonesia⁷⁸.

UNICEF berpendapat bahwa anak di Indonesia memiliki peluang yang lebih baik untuk bersekolah. Anak dan juga remaja yang berasal dari latar belakang keluarga miskin, disabilitas, dan tinggal di daerah terpencil dan tertinggal menjadi anak yang paling besar memiliki resiko untuk putus sekolah. UNICEF mengemukakan bahwa remaja yang pada masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki rentan usia 13-15 tahun yang memiliki latar belakang kemiskinan, memiliki potensi lima kali lebih besar kemungkinan untuk angka putus sekolah.

Remaja di Indonesia memiliki kerentanan atau resiko untuk kehilangan akan pengembangan potensi penuh dari remaja tersebut. Oleh karena hal tersebut UNICEF

⁷⁸ Safira, Kusuma, and Afrimadona, "Implementasi Kerja Sama Indonesia Dan UNICEF Dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak Di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020]."

hadir bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk berupaya meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia yang memiliki keterbatasan. UNICEF memiliki prioritas di bidang pendidikan dengan mengurangi angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang tinggi dan menjadi prioritas Pemerintah Indonesia juga untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang inklusif terhadap keadilan di tahun 2030. UNICEF mendukung dengan penelitian, advokasi kebijakan, penguatan sistem terhadap akses pendidikan, peningkatan hasil belajar, dan pengembangan keterampilan⁷⁹.

UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menemukan dan merancang solusi-solusi inovatif yang dianggap dapat lebih efektif dalam menangani suatu masalah. Fokus utama Indonesia dalam upaya mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah mendorong UNICEF untuk memberikan dukungan yang terfokus pada pembuatan bukti melalui penyediaan data, advokasi kebijakan, serta penguatan sistem guna memastikan akses pendidikan yang adil, peningkatan hasil pembelajaran, dan pengembangan keterampilan remaja. Perencanaan dan pelaksanaan strategi penanganan Anak Terlantar dan Tidak Sekolah (Stranas ATS) didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Strategi penanganan ATS dirancang dengan merujuk pada kebijakan pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas dari program-program yang telah diterapkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga.
2. Permasalahan ATS dianggap sebagai tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta pihak

⁷⁹ UNICEF Indonesia, "Pendidikan Dan Remaja," UNICEF INDONESIA, n.d., <https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja>.

terkait lainnya. Untuk menanggulangi permasalahan ini, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan.

3. Pemerintah daerah dan pihak terkait mengembangkan strategi penanganan ATS di tingkat lokal sebagai tanggapan terhadap situasi permasalahan ATS yang ada di wilayah mereka. Perlu mengidentifikasi dan mengatasi dengan jelas faktor-faktor yang menyebabkan ketidakekolahan anak dan hambatan partisipasi sekolah melalui strategi yang didesain dan diterapkan sesuai dengan konteks lokal.
4. Penanganan ATS dengan solusi dan strategi yang berbasis pada kearifan lokal dapat menjadi fondasi untuk menggandakan, menyesuaikan, dan memperluasnya, sehingga strategi serupa dapat diterapkan di wilayah lain atau ditingkatkan ke skala nasional.
5. Pengembangan strategi penanganan ATS harus berlandaskan pada data dan informasi yang akurat mengenai ATS. Ini penting sebagai panduan dalam merencanakan dan menganggarkan agar penanganan ATS sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi di setiap wilayah⁸⁰.

Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) sebagai upaya untuk mempercepat penanganan permasalahan anak putus sekolah, Bapenas bekerja sama dengan UNICEF dan didukung kementerian dan lembaga mengembangkan Strategi Nasional Penanggulangan Anak Putus Sekolah (Stranas ATS). Strategi Nasional ATS yang dikembangkan memberikan kerangka logis dan strategis bagi upaya pengelolaan ATS nasional yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

⁸⁰ Sari, "IMPLEMENTASI KERJASAMA UNICEF DAN INDONESIA DALAM STRATEGI NASIONAL PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (STRANAS ATS) (STUDI KASUS: NAGARI TARUANG-TARUANG TAHUN 2020-2021)."

Strategi Nasional ATS menyajikan analisis situasi anak usia sekolah Indonesia (7-18 tahun) yang saat ini tidak bersekolah atau menerima layanan atau pelatihan pendidikan, termasuk analisis terhadap kebijakan dan program yang dilakukan. Implementasi oleh pemerintah Indonesia dan kesenjangan yang masih ada. Strategi Nasional ATS mengusulkan serangkaian strategi prioritas untuk mencegah anak-anak putus sekolah dan melakukan intervensi terhadap anak-anak yang putus sekolah melalui kegiatan pengumpulan data, penjangkauan, dan dukungan ATS sampai anak-anak kembali ke pendidikan yang sesuai, serta dengan memperluas dan memperkuat kerangka kebijakan, program dan berbagai komponen sistem layanan pendidikan, yang masih menjadi tantangan dan faktor penyebab anak tidak bersekolah.

Sejumlah lembaga berperan dalam keberhasilan implementasi strategi nasional tersebut, antara lain Bappenas, Kementerian Koordinasi Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Staf Presiden berperan mengkoordinasi berbagai Koordinasi terkait penguatan dan perluasan kerangka kebijakan dan program pendukung utama untuk penanganan ATS di daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan ATS; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi dan mendorong pengembangan dan pelaksanaan strategi pendataan ATS yang tepat sasaran dan akurat; Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mendorong dan memantau pelaksanaan perencanaan penanganan ATS dengan pemerintah daerah; dan Kementerian teknis (misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan sejumlah Kementerian lainnya) mendorong dan mendukung pelaksanaan aksi

prioritas penanganan ATS terkait berbagai isu ATS melalui perluasan dan penguatan program yang sudah berjalan dan yang perlu dikembangkan.

Tim teknis desa/kelurahan yang dipimpin oleh kepala desa terdiri dari staf administrasi desa, kepala sekolah dan guru, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dengan dukungan tim teknis daerah, tim teknis desa bertugas:

1. Pengumpulan dan pemutakhiran data terkait ATS (jumlah dan lokasi ATS, serta faktor-faktor yang menyebabkan anak menolak sekolah)
2. Strategi pengembangan untuk mengatasi ATS Empat tujuan strategi intervensi ATS (Kegiatan berkualitas tinggi di tingkat desa di kolaborasi dengan tim teknis daerah, termasuk memastikan ketersediaan layanan pendidikan dan pelatihan yang relevan, mengupayakan dan mendorong pencapaian (eksplorasi dan advokasi); (untuk semua kelompok ATS)
3. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penapisan dan penjangkauan anak-anak putus sekolah di desa/kabupaten, dan dukungan bagi anak-anak yang bersekolah
4. Upaya pengelolaan ATS dengan pendanaan yang memadai diintegrasikan ke dalam pekerjaan pemerintah desa rencana, termasuk pengorganisasiannya (melalui pengalokasian dana desa); (ADD, Dana Desa (DD) atau sumber lainnya)
5. Melaporkan kepada tim teknis regional mengenai kegiatan dan kemajuan dalam upaya pengelolaan ATS dan mendiskusikan permasalahannya⁸¹.

Dalam kerjasama Anak Tidak Sekolah di Jember, Pemerintah Jember melakukan Kerjasama dengan UNICEF mengatur beberapa hal terkait anak putus sekolah di Provinsi Jember. Kerja sama ini dapat mencakup program-program yang meningkatkan akses

⁸¹ Kementerian PPN/Bappenas, "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah Di Indonesia," n.d.

terhadap pendidikan bagi anak-anak yang tidak bersekolah di sekolah formal. Misalnya, upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan akses alternatif terhadap pendidikan, seperti program pembelajaran jarak jauh atau kursus tambahan di luar lingkungan sekolah. Selain itu, peraturan ini juga dapat memberikan dukungan terhadap penyediaan fasilitas pembelajaran yang tersedia bagi anak-anak di luar sekolah, seperti pusat pembelajaran dan perpustakaan masyarakat.

Kerja sama dengan UNICEF berfokus pada upaya meningkatkan inklusi pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang tidak bersekolah. Hal ini dapat mencakup strategi untuk mengidentifikasi dan mendukung anak-anak yang menghadapi hambatan dalam pendidikan formal. Penataan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi anak-anak putus sekolah di Kabupaten Jember untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan haknya sebagai anak. Langkah-langkah nyata, seperti mengembangkan program pembelajaran alternatif dan menyediakan fasilitas pendukung, dapat membantu menutup kesenjangan pendidikan dan memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal⁸².

Strategi Nasional ATS (Stranas ATS) sangat penting bagi upaya Kabupaten Jember dalam mengatasi permasalahan anak putus sekolah (ATS), khususnya melalui kerjasama dengan UNICEF. Pertama, sebagai bagian dari Strategi Nasional ATS, pemerintah pusat mengarahkan pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang mendorong inklusi sosial dan ekonomi, termasuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak ATS. Kabupaten Jember dengan dukungan UNICEF mampu mengembangkan dan melaksanakan inisiatif pendidikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan anak di luar

⁸² Kementerian PPN/Bappenas.

sistem pendidikan formal.

Kedua, strategi ATS nasional fokus pada peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Kolaborasi kami dengan UNICEF akan memperkuat kapasitas Kabupaten Jember dalam memberikan layanan pendidikan yang komprehensif dan berkualitas kepada anak-anak ATS dengan mengintegrasikan program berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui kerja sama ini, Kabupaten Jember bertujuan untuk mengatasi permasalahan ATS dengan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, sejalan dengan arah Strategi Nasional ATS, dan mencapai transformasi sosial yang komprehensif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

